



Pengaruh Pelatihan, Tingkat Pendidikan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Instansi Pemerintah Kabupaten Maros

Iin Andriani¹, Ayu Puspitasari^{2*}, Yudi Satria³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Indonesia

*Penulis Korespondensi: puspitaayu150@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the effect of training, education level, and internal control systems on the quality of financial reports in government agencies of Maros Regency. This study used a quantitative approach with an explanatory research design. Data were collected through questionnaires distributed to 150 respondents who were financial management employees at 30 Regional Work Units (OPD) in Maros Regency, selected using purposive sampling. The data analysis techniques used included validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination (R^2), assisted by the SPSS application. The results show that training, education level, and internal control systems each have a positive and significant partial effect on the quality of financial reports, with the internal control system being the most dominant contributing variable. Simultaneously, the three variables also have a significant effect on the quality of financial reports, with an R Square value of 0.484, indicating that the three variables explain 48.4% of the variation in financial report quality. This study recommends strengthening continuous training, aligning employee placement with educational background, and strengthening internal control systems to improve the accountability of regional financial management.*

Keywords: *Education Level; Financial Report Quality; Government Agencies; Internal Control System; Training.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan, tingkat pendidikan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 150 responden yang merupakan pegawai pengelola keuangan pada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maros, yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan, tingkat pendidikan, dan sistem pengendalian internal masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial, dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel yang memberikan kontribusi paling dominan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai *R Square* sebesar 0,484 yang berarti ketiga variabel mampu menjelaskan 48,4% variasi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan berkelanjutan, kesesuaian penempatan pegawai dengan latar belakang pendidikan, serta penguatan sistem pengendalian internal guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Instansi Pemerintah; Kualitas Laporan Keuangan; Pelatihan; Sistem Pengendalian Internal; Tingkat Pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Kualitas laporan keuangan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sehingga mampu menjadi dasar pertanggungjawaban publik serta pengambilan keputusan fiskal pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Pada tingkat global, kualitas pelaporan keuangan sektor publik merupakan indikator kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan modern yang menentukan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara (OECD, 2022).

Peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia semakin menguat seiring tuntutan reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas fiskal. Meskipun demikian, masih ditemukan permasalahan berulang seperti kelemahan pengendalian internal, salah saji akun, ketidaksesuaian penyajian aset, dan rendahnya kompetensi aparatur pada beberapa satuan kerja (BPK RI, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum merata, terutama pada daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan kelemahan sistem pengendalian internal.

Kondisi serupa terjadi pada Pemerintah Kabupaten Maros. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sulawesi Selatan tahun 2023, Kabupaten Maros memperoleh opini WTP, namun tetap ditemukan catatan penting terkait kesalahan pengklasifikasian akun, belum optimalnya penatausahaan aset, ketidaktepatan dokumentasi bukti transaksi, serta belum maksimalnya implementasi pengendalian internal pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp283,7 miliar atau 99,04% dari target Rp286,4 miliar, sementara target PAD ditetapkan meningkat menjadi Rp314 miliar dalam APBD Perubahan. Peningkatan penerimaan daerah ini menuntut pengelolaan keuangan yang didukung oleh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal yang efektif agar tidak terjadi kesalahan pencatatan, kesalahan alokasi anggaran, maupun potensi penyimpangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

Fenomena lapangan menunjukkan bahwa sebagian pegawai pengelola keuangan di Kabupaten Maros belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan belum mengikuti pelatihan teknis secara berkala, khususnya terkait implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aplikasi SIMDA Keuangan, dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual (Inspektorat Maros, 2024). Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kompetensi, pendidikan, dan pengalaman pelatihan aparatur (Mahmudi, 2021). Selain itu, hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Maros (2024) menunjukkan bahwa beberapa OPD masih memiliki kelemahan pada aspek lingkungan pengendalian, pemantauan, dan dokumentasi prosedur, sehingga meningkatkan risiko kesalahan pencatatan maupun pelaporan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Sejumlah studi menemukan bahwa pelatihan, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan (Cahyani & Atmadja, 2023; Mutoharoh & Ifada, 2023; Setiyawati & Doktoralina,

2023; Rahmawati, 2022; Lestari, 2020). Sebaliknya, penelitian lain menemukan bahwa variabel tertentu seperti tingkat pendidikan dan sebagian elemen tata kelola tidak berpengaruh signifikan (Hidayat, 2021; Susilo et al., 2021; Reynanto, 2023; Samosir & Simanjuntak, 2020). Inkonsistensi temuan empiris tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu diuji kembali, terutama mengenai pengaruh simultan variabel pelatihan, tingkat pendidikan, dan sistem pengendalian internal pada konteks pemerintah daerah yang berbeda, khususnya Kabupaten Maros yang belum banyak diteliti dengan kombinasi ketiga variabel tersebut dalam satu model.

Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada *Agency Theory*, yang menjelaskan bahwa aparat pemerintah sebagai agent berpotensi menyalahgunakan kewenangan atau informasi jika tidak didukung oleh pelatihan dan mekanisme pengendalian yang memadai (Jensen & Meckling, 1976). Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pengujian pengaruh sistem pengendalian internal sekaligus peran pelatihan dan tingkat pendidikan secara simultan pada Pemerintah Kabupaten Maros, yang menjadi semakin relevan seiring pemberlakuan kebijakan akuntansi baru dan digitalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan, tingkat pendidikan, dan sistem pengendalian internal, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kabupaten Maros.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada *Agency Theory*, yang menjelaskan bahwa aparat pemerintah sebagai *agent* berpotensi menyalahgunakan kewenangan atau informasi jika tidak didukung oleh kompetensi dan mekanisme pengendalian yang memadai (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks sektor publik, masyarakat bertindak sebagai *principal* yang mendelegasikan wewenang pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah sebagai *agent*, sehingga dibutuhkan instrumen yang dapat mengurangi asimetri informasi dan menjamin akuntabilitas, salah satunya melalui pelatihan, peningkatan pendidikan, dan penguatan sistem pengendalian internal.

Pelatihan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan (Mangkunegara, 2021). Pegawai yang rutin mengikuti pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, SIMDA Keuangan, SIPD, dan pengelolaan aset cenderung lebih teliti, akurat, dan patuh terhadap regulasi, sehingga pelatihan diperkirakan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Tingkat pendidikan formal, terutama pada bidang akuntansi atau bidang terkait, memberikan landasan konseptual, kemampuan analisis, dan pemahaman regulasi yang lebih kuat bagi pegawai (Hasibuan, 2022). Pegawai berpendidikan tinggi lebih mudah memahami perubahan kebijakan akuntansi serta mengoperasikan aplikasi keuangan berbasis digital, meskipun sejumlah penelitian menunjukkan temuan yang bervariasi terkait pengaruh variabel ini.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan kerangka COSO (2023) mencakup lima komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sistem pengendalian internal yang kuat mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan sejak dini sehingga meningkatkan keandalan, relevansi, dan keterbandingan laporan keuangan, serta berperan sebagai mekanisme *monitoring* dalam kerangka *Agency Theory*.

Berdasarkan uraian teori dan bukti empiris tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (H1) pelatihan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kabupaten Maros; (H2) tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kabupaten Maros; (H3) sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kabupaten Maros; dan (H4) pelatihan, tingkat pendidikan, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kabupaten Maros.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel melalui pengujian hipotesis statistik (Creswell & Creswell, 2023). Penelitian dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Maros, mencakup seluruh OPD yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dengan periode pelaksanaan Oktober 2025 hingga Maret 2026.

Populasi penelitian meliputi seluruh pegawai pengelola keuangan pada 30 OPD aktif di Kabupaten Maros. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan, meliputi Kepala Sub Bagian Keuangan, staf pengelola keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Sebanyak 5

responden dipilih pada setiap OPD, sehingga total sampel penelitian berjumlah 150 responden ($30 \text{ OPD} \times 5 \text{ responden}$).

Variabel penelitian terdiri atas tiga variabel bebas, yaitu pelatihan (X1), tingkat pendidikan (X2), dan sistem pengendalian internal (X3), serta satu variabel terikat, yaitu kualitas laporan keuangan (Y). Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda dengan metode Enter, uji t untuk pengujian parsial, uji F untuk pengujian simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, dalam Nusantara, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden penelitian berjumlah 150 orang yang berasal dari 30 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan berjumlah 86 orang (57,3%) dan responden laki-laki berjumlah 64 orang (42,7%), yang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah cukup dominan. Sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan SLTA, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan turut ditopang oleh pengalaman kerja, pelatihan, dan bimbingan teknis yang diikuti pegawai.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel pelatihan (X1), tingkat pendidikan (X2), dan sistem pengendalian internal (X3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t Hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	8,550	6,894	<0,001	-
Pelatihan (X1)	0,172	2,489	0,014	Positif Signifikan
Tingkat Pendidikan (X2)	0,174	2,006	0,047	Positif Signifikan
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,215	3,877	<0,001	Positif Signifikan

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 8,550 + 0,172X_1 + 0,174X_2 + 0,215X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 8,550 menunjukkan bahwa apabila pelatihan, tingkat pendidikan, dan sistem pengendalian internal dianggap konstan, maka kualitas laporan keuangan bernilai 8,550.

Ketiga variabel independen memiliki koefisien regresi positif, yang berarti peningkatan pada masing-masing variabel akan diikuti oleh peningkatan kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal memiliki koefisien regresi terbesar (0,215), sehingga menjadi variabel yang memberikan kontribusi paling dominan dalam model, diikuti oleh tingkat pendidikan (0,174) dan pelatihan (0,172).

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil uji t pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel pelatihan memiliki nilai signifikansi 0,014 ($< 0,05$), tingkat pendidikan memiliki nilai signifikansi 0,047 ($< 0,05$), dan sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikansi $< 0,001$ ($< 0,05$). Dengan demikian, H1, H2, dan H3 diterima, yang berarti pelatihan, tingkat pendidikan, dan sistem pengendalian internal masing-masing berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2. Hasil Uji F (Simultan).

Model	F Hitung	Sig.	Keterangan
Regression	45,654	$<0,001$	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS, 2026.

Hasil uji F pada Tabel 2 menunjukkan nilai F hitung sebesar 45,654 dengan signifikansi $< 0,001$ ($< 0,05$), sehingga H4 diterima. Hal ini berarti pelatihan, tingkat pendidikan, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kabupaten Maros.

Tabel 3. Koefisien Determinasi (R^2).

Keterangan	Nilai
R	0,695
R Square	0,484
Adjusted R Square	0,473
Std. Error of the Estimate	2,288

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS, 2026.

Nilai R sebesar 0,695 menunjukkan bahwa hubungan antara pelatihan, tingkat pendidikan, dan sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan berada pada kategori kuat. Nilai R Square sebesar 0,484 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan 48,4% variasi kualitas laporan keuangan, sedangkan 51,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,473 menegaskan tingkat kemampuan penjelasan model setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan.

Pembahasan

Pengaruh Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pelatihan yang diikuti pegawai, seperti pelatihan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan laporan keuangan berbasis SAP, bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah, serta pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan pemahaman pegawai terhadap prosedur akuntansi pemerintahan sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Temuan ini konsisten dengan Agency Theory yang menekankan bahwa peningkatan kompetensi agent mengurangi asimetri informasi, serta sejalan dengan temuan (Cahyani & Atmadja, 2023; Mutoharoh & Ifada, 2023; Rahmawati, 2022).

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Tingkat pendidikan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pegawai dengan tingkat pendidikan yang lebih baik memiliki kemampuan analitis, pemahaman teknis, dan ketelitian yang lebih baik dalam menyusun laporan keuangan. Meskipun mayoritas responden dalam penelitian ini berpendidikan SLTA, kompetensi tersebut tetap dapat ditingkatkan melalui pengalaman kerja, pelatihan, dan bimbingan teknis, sehingga tingkat pendidikan formal bukan satu-satunya faktor penentu kualitas laporan keuangan. Temuan ini mendukung penelitian Setiyawati & Doktoralina (2023) dan Lestari (2020), namun berbeda dengan temuan Hidayat (2021) dan Susilo et al. (2021) yang menemukan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan, kemungkinan disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden dan lokasi penelitian.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan, serta menjadi variabel dengan kontribusi paling dominan dalam penelitian ini. Penerapan pemisahan tugas, verifikasi dokumen, otorisasi oleh pejabat berwenang, serta pengawasan oleh pimpinan dan APIP membantu meminimalkan kesalahan pencatatan, mencegah penyimpangan, dan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Sesuai Agency Theory, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi potensi konflik kepentingan antara principal dan agent. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Mutoharoh & Ifada, 2023); Setiyawati & Doktoralina, 2023; Rahmawati, 2022).

Pengaruh Simultan. Pelatihan, tingkat pendidikan, dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ketiga faktor saling melengkapi: pelatihan dan tingkat pendidikan meningkatkan kompetensi individu,

sedangkan sistem pengendalian internal menyediakan kerangka pengawasan institusional. Kombinasi ketiga faktor ini menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan pengaruh parsial masing-masing variabel, dan menegaskan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan sinergi antara peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan mekanisme pengendalian internal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan, tingkat pendidikan, dan sistem pengendalian internal masing-masing berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kabupaten Maros, dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel yang paling dominan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan kemampuan penjelasan model sebesar 48,4% ($R Square = 0,484$).

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain penggunaan metode survei dengan self-assessment yang berpotensi menimbulkan bias persepsi responden, nilai *Cronbach's Alpha* pada salah satu instrumen sedikit di bawah batas ideal (0,598), serta cakupan penelitian yang terbatas pada OPD Kabupaten Maros sehingga hasil belum tentu dapat digeneralisasikan pada daerah lain.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Maros terus meningkatkan kualitas pelatihan pegawai pengelola keuangan, memperhatikan kesesuaian penempatan pegawai dengan latar belakang pendidikan, serta memperkuat sistem pengendalian internal terutama pada aspek pengawasan, pemantauan, dan dokumentasi prosedur. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, *good governance*, motivasi kerja, dan komitmen organisasi agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Maros beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang telah memberikan izin dan dukungan data dalam penelitian ini. Artikel ini merupakan pengembangan dari skripsi penulis pertama pada Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, di bawah bimbingan penulis kedua dan ketiga.

DAFTAR REFERENSI

- BPK RI. (2023). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah*.
- Cahyani, N., & Atmadja, A. T. (2023). Pengaruh pelatihan, tingkat pendidikan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2023). *Internal control Integrated framework*. COSO.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage.
- Etikan, I. (2022). Sampling and sampling methods. *Biostatistics International Journal*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, R. (2021). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Lestari, D. (2020). Kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik.
- Mahmudi. (2021). *Akuntansi sektor publik*. UII Press.
- Mutoharoh, & Ifada, L. (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
- Nusantara, T. (2021). Analisis statistik dan uji F dalam penelitian kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 34-48. <https://doi.org/10.25299/s.v2i1.10939>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Public sector financial reporting and transparency*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010).
- Rahmawati, N. (2022). Pelatihan SDM terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah.
- Reynanto, A. (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maros.
- Samosir, M., & Simanjuntak, V. (2020). Pelatihan dan kompetensi terhadap laporan keuangan.
- Setiyawati, L., & Doktoralina, C. M. (2023). Kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Susilo, A., Handayani, S., & Putri, D. (2021). The effect of internal control and good corporate governance on accounting information quality.